

Puluhan Warga Desak Pengembang Kembalikan Uang Pembelian Kavling

JAKARTA (IM) - Puluhan warga mendesak pihak pengembang lahan kavling di kawasan Perumahan Jatinegara Indah, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, untuk mengembalikan uang pembelian lahan yang sudah mereka bayar.

Puluhan warga yang mendatangi kantor virtual pengembang di Jalan Perumahan Jatinegara Indah, Kecamatan Cakung, Rabu (13/7). Mereka menagih janji pengembang untuk menuntaskan akad perjanjian lahan kavling yang sebelumnya sudah dibayar hingga menjadi status Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Dasarnya dari tahun 2019 kita melakukan transaksi (pembayaran). Pada 2021 itu tiba-tiba ada plang sengketa di lahan kavling dan kita meminta ‘refund’ (pengembalian uang). Namun, dari 2021 hingga 2023 ini tidak ada itikad baik dari pengembang,” kata salah satu warga, Apri (37), Rabu (13/7).

Warga terus mendesak pihak pengembang untuk mengembalikan dana yang sudah mereka bayar, yang jumlahnya mencapai Rp 21 miliar.

Pengembang kemudian berjanji kepada warga yang sudah membayar untuk

mengembalikan secara keseluruhan kerugian tersebut, namun meminta waktu hingga akhir Juli 2023.

“Jika ingkar dari pernyataan yang sudah dibuat, para korban berniat membawa kasus tersebut ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polsek Cakung,” kata Apri.

Menurut dia, para warga memiliki bukti-bukti terkait pembelian lahan kavling tersebut guna memudahkan aparat kepolisian melakukan penyelidikan.

“Kami sudah bikin surat pernyataan. Jadi ketika mereka melanggar lebih dari Juli 2023 ini, bahwa mereka mengakui itu adalah penipuan atau penggelapan dana. Sehingga, mereka wajib mengembalikan,” kata Apri.

Kapolsek Cakung, Kopol Syarifah Chaira yang datang ke lokasi berusaha meredam amarah warga kepada pengembang.

Syarifah juga melakukan mediasi antara warga dengan pengembang.

“Saya minta warga membubarkan diri. Kalau ada unsur tindak pidana, segera melaporkan ke Polsek Cakung. Saya akan bantu agar mempercepat proses penyelidikan,” kata Syarifah. ● yan

Anies: Kemiskinan Ekstrem Terjadi di Jakarta, Harus Dibereskan

JAKARTA (IM) - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan mengatakan kemiskinan ekstrem masih terjadi pusat pemerintahan negara, DKI Jakarta. Anies mengaku meriset hal tersebut saat berkeliling sebelum menjadi gubernur. Menurut Anies, kesenjangan sosial di ibu kota sangat tinggi.

“Kemiskinan ekstrem itu tidak di pelosok yang jauh di sana, tapi adanya justru di pusat pemerintahan negara kita Jakarta,” ujar Anies dalam Rakernas XVI Apeksi di Makassar, Kamis (13/7). Anies menilai kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan perlu dibereskan terlebih dahulu dari pada permasalahan lain.

“Yang ekstrem miskin di situ, yang ekstrem kaya juga di situ. Jadi, ketimpangan di kota-kota kita itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal,” katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut ketimpangan dan permasalahan tersebut terletak pada pertumbuhan yang tidak berkeadilan.

“Di Jakarta ini, kalau kita lihat tata ruangnya itu berkembang tanpa

dikendalikan sebuah visi tentang pergerakan penduduk,” katanya.

Ia juga menyoroti soal tata ruang di Jakarta. Anies menyebut ruang terbuka di Jakarta tersisa 8 persen saja, sedangkan 92 persen lainnya sudah tertutup.

“Jakarta itu tinggal 8 persen tanah terbuka 92 persen tertutup. Kami lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang,” ucapnya.

Anies lantas berpendapat bahwa kota-kota di Indonesia perlu ditata agar layak dihuni masyarakat. Sebab, menurutnya, banyak penduduk tinggal di kota dari pada di desa sejak 2009. “Urbanisasi tak bisa dihindari, tapi masalah yang ada di kota itu adalah pilihan, mau membiarkan atau mengantisipasi?” ujar Anies.

Ia tak mempermasalahkan adanya urbanisasi. Namun, ia menilai Jakarta tidak baik untuk Indonesia.

“Urbanisasi bagi-baik saja, tapi yang tidak boleh itu Jakarta, normal di seluruh dunia,” katanya. ● yan

4 Metropolis

IDN/ANTARA



SKYBRIDGE STASIUN HALIM KCJB DAN STASIUN LRT

Seorang pekerja memotret skybridge atau jembatan penghubung Stasiun LRT (Light Rail Transit) dan Stasiun Halim (Kereta Cepat Jakarta Bandung) KCJB di Jakarta, Kamis (13/7). Skybridge sepanjang 200 meter untuk mengintegrasikan dua transportasi tersebut dan ditargetkan dapat digunakan pada uji coba (18/8).

Pemprov DKI Diminta Batasi Kendaraan ASN daripada Atur Jam Masuk Kerja

Pengaturan jam masuk kerja untuk para ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan kurang efektif. Menurut Anggota komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyarankan Pemprov DKI mewajibkan ASN menggunakan transportasi publik. Tetapi fasilitas untuk transportasi umum di sini (Jakarta) harus layak digunakan agar masyarakat bisa nyaman dan aman,” ucap Gembong.

JAKARTA (IM) - Anggota komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) lebih baik membatasi kendaraan aparat sipil negara (ASN) daripada mengatur jam masuk kerja.

Cara itu dia nilai lebih efektif mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

“Kepada ASN ini lebih kepada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi lalu beralih ke transportasi umum,” ujar Gembong saat dihubungi, Kamis (13/7).

Gembong menilai, pengaturan jam masuk kerja untuk para ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan kurang efektif.

Pejabat legislatif komisi A yang membidangi Pemerintahan menyarankan Pemprov DKI mewajibkan ASN menggunakan transportasi publik.

“Tetapi fasilitas untuk transportasi umum di sini (Jakarta) harus layak digunakan agar masyarakat bisa nyaman dan aman,” ucap Gembong.

Untuk diketahui, uji coba pengaturan jam kerja akan diberlakukan kepada pegawai Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo sebelumnya menjelaskan alasan uji coba pengaturan jam masuk kerja yang akan diberlakukan hanya untuk pegawai Pemprov DKI Jakarta.

Uji coba penerapan jam kerja bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta itu ditetapkan setelah melalui berbagai pertimbangan pada focus group discussion (FGD).

“Tentu kami melihat dari yang paling cepat diimplementasikan dalam waktu dekat kan itu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” ujar Syafrin.

Syafrin mengatakan, jumlah pegawai Pemprov DKI Jakarta cukup banyak. Untuk aparat sipil negara (ASN) sekitar 70.000 dan non pegawai negeri sipil (PNS) mencapai 120.000 orang.

“Artinya cukup besar, begitu kita melakukan pengaturan maka otomatis ada dampaknya dan ini yang akan kita ukur,” kata Syafrin.

Namun Syafrin belum mengungkapkan kapan uji coba penerapan pengaturan jam masuk kerja bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta itu diberlakukan di Ibu Kota. Menurut Syafrin, penerapan pengaturan jam masuk kerja di Ibu Kota sampai saat ini masih didiskusikan oleh

Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Sekarang sedang didiskusikan. Jika memang sudah siap kami akan sampaikan,” ucap Syafrin.

Adapun pengaturan jam kerja direncanakan karena melihat kemacetan yang kerap terjadi ketika jam masuk dan pulang kerja karyawan. Pengaturan masuk jam kerja di Ibu Kota diyakini dapat membuat kemacetan yang kerap terjadi di Jakarta bisa terurai.

“Begitu ada pembagian dua shift (jam kerja), jam puncaknya (kepadatan lalu lintas) itu akan terdistribusi normal,” tutur Syafrin. Berdasarkan analisis Dishub DKI, puncak kepadatan lalu lintas pertama diperkirakan terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. Kepadatan ini terjadi ketika pengendara kendaraan bermotor mengejar jam kerja pukul 08.00 WIB. ● yan

DPRD-Pemprov DKI Sepakat Susun Raperda Tata Ruang untuk 20 Tahun ke Depan

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetujui pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2022-2042.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan, kesepakatan ini menjadi dasar untuk mem-

bahas perbaikan tata ruang hingga 20 tahun mendatang.

“Langkah ini diperlukan karena tata ruang di Jakarta dianggap belum baik. Kondisi ini berimbas pada terjadi macet dan banjir di Ibu Kota. Kalau ada kawasan padat di sini, sementara di sana ada banjir, kan tidak fair juga,” kata Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (13/7).

Lewat kesepakatan ini,

Prasetyo berharap Pemerintah Provinsi Jakarta bisa lebih memperhatikan pemerataan pembangunan dan mengatur lokasi ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan.

“Nah, di sini lah kerjasama Pak Gubernur dan DPRD, supaya sinkron pembangunan Jakarta 20 tahun ke depan dan lebih baik,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru

Budi Hartono mengatakan, pembahasan lebih lanjut soal Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2022-2042, akan dilaksanakan setelah substansinya mendapat persetujuan dari Kementerian ATR/BPN.

“Selanjutnya akan dilakukan evaluasi Raperda di Kementerian Dalam Negeri dan akhirnya penetapan Perda Rencana Tata Ruang

Wilayah,” kata Heru.

Pihaknya mengatakan proses penyusunan Raperda RTRW dimulai setelah dilaksanakan proses Peninjauan Kembali (PK) Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 pada 2012 dan telah diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sejak 2020. ● yan

Kapolres Metro Depok Tinjau Kondisi TPA Cipayang yang Sudah Overload

DEPOK (IM) - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady meninjau

langsung kondisi TPA Cipayang yang sudah kelebihan kapasitas (overload) sehingga

menyebabkan pengangkutan sampah warga menjadi terhambat.

“Kita lihat beberapa waktu lalu ada viral tentang penanganan sampah, kita langsung lihat kondisinya di TPA Cipayang ini. Memang kondisinya sudah sangat overload sehingga sudah mengganggu permasalahan sampah yang ada di Kota Depok ini memang perlu waktu,” kata Kapolres usai melakukan aksi bersih-bersih di TPA Cipayang, Kamis (13/7).

Ahmad Fuady menam-

bahkan kondisi TPA Cipayang yang overload ini berdampak pada antrean kendaraan pembuangan sampah sehingga ada keterlambatan pengangkutan sampah di wilayah Depok.

Setelah memantau kondisi TPA Cipayang sambung Ahmad Fuady mulai masuk ke area TPA Cipayang pembuangan waktu sekitar lebih dari delapan jam.

“Kita lihat antrean kendaraan untuk membuang dan sampah itu dikelola dengan baik itu butuh waktu, karena dari mulai masuk kendaraan

sampah sampai TPA Cipayang butuh waktu kurang lebih sekitar 10 jam atau lebih dari 8 jam dan ini perlu menjadi penanganan dari kita,” kata Ahmad Fuady.

Ahmad Fuady menambahkan para sopir pengangkut sampah ada yang menginap karena jam operasional mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB. “Jam operasional sampai jam 5 sore, dan pagi dibuka jam 7 Kalau sudah masuk lewat jam 3, 4, dan 5 mereka menginap karena datangnya sore,” ungkap Ahmad Fuady. ● yan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ARMADA BUMI PRATIWI LINES

Dengan ini, Direksi PT Armada Bumi Pratiwi Lines, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 31 Juli 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda : Perubahan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 14 Juli 2023
Direksi Perseroan
PT Armada Bumi Pratiwi Lines

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ARMADA MARITIME OFFSHORE

Dengan ini, Direksi PT Armada Maritime Offshore, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 31 Juli 2023
Waktu : Pukul 10.20 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda : Perubahan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 14 Juli 2023
Direksi Perseroan
PT Armada Maritime Offshore

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PUTRA UTAMA LINE

Dengan ini, Direksi PT Putra Utama Line, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 31 Juli 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda : Perubahan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 14 Juli 2023
Direksi Perseroan
PT Putra Utama Line

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SUKSES MARITIME LINE

Dengan ini, Direksi PT Sukses Maritime Line, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 31 Juli 2023
Waktu : Pukul 11.00 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda : Perubahan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 14 Juli 2023
Direksi Perseroan
PT Sukses Maritime Line

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SUKSES OSEAN KHATULISTIWA LINE

Dengan ini, Direksi PT Sukses Osean Khatulistiwa Line, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 31 Juli 2023
Waktu : Pukul 11.20 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda : Perubahan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 14 Juli 2023
Direksi Perseroan
PT Sukses Osean Khatulistiwa Line

PENGUMUMAN

Kami, Direksi PT Sabitha Triguna Mandiri, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 13 Juli 2023, para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Menyetujui untuk mengeluarkan saham baru Perseroan sebanyak 191.133 (seratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga) lembar saham yang akan diambil bagian oleh PT Maheswara Pradana Abhinaya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan cara konversi utang Perseroan kepada Pemegang Saham.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 PP No 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 14 Juli 2023
Direksi Perseroan



KAPOLRES DEPOK TINJAU KONDISI TPA CIPAYUNG

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Ahmad Fuady (kanan) melihat antrean truk pengangkut sampah di TPA Cipayang, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/7). Kapolres Metro Depok mengatakan siap membantu Pemerintah Kota Depok untuk penanganan TPA Cipayang yang sudah kelebihan kapasitas serta jalur masuk truk yang tergenang longsoran sampah yang menyebabkan terhambatnya proses pembuangan.